

## Duterte Perintahkan Militer dan Polisi Habisi Pemberontak Komunis

MANILA(IM) - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengatakan, dia telah memerintahkan tentara dan polisi untuk membunuh, dan "menghabisi" pemberontak komunis di negara itu. Hal itu disampaikan Duterte pada pertemuan pemerintah yang bertujuan melawan komunisme.

"Saya telah memberitahu militer dan polisi, bahwa jika mereka menemukan diri mereka dalam pertempuran bersenjata dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup," kata Duterte.

"Saya juga memerintahkan mereka untuk melupakan HAM dan saya dia tidak takut masuk penjara. Itu bukan masalah," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (7/3).

Dia juga berbicara langsung kepada pemberontak komunis, menyebut mereka "bandit" dan mengatakan bahwa mereka tidak punya ideologi. Baca juga: Soal Perempuan di Parlemen, Indonesia di bawah Filipina dan Timor Leste

Duterte, bagaimanapun, menjanjikan pekerjaan, perumahan dan mata pencaharian jika para pemberontak menyerahkan senjata mereka.

Pernyataan itu menimbulkan kekhawatiran akan lebih banyak kekerasan karena Duterte telah dituduh melanggar HAM oleh aktivis dan organisasi internasional. Baca juga: Filipina Pecat Mantan Dubes untuk Brazil karena Menyerang Seorang PRT

Di mana, mereka mengatakan bahwa jumlah kematian sebenarnya dari perang terhadap narkoba yang dilancarkan Duterte jauh melebihi angka yang disampaikan dalam statistik resmi. ● gul



KECELAKAAN BUS UKRAINA DI POLANDIA

Pemandangan umum lokasi kecelakaan bus Ukraina di sisi jalan raya A4 dari Jaroslaw ke Korczowa, dekat Koszyce, Polandia, Sabtu (6/3). Gambar diambil menggunakan drone.

## Myanmar Makin Mencekam, Banyak Warga Kabur ke India

Pejabat India menuturkan, puluhan warga Myanmar telah berkumpul di perbatasan dan menunggu untuk bisa masuk ke negara itu.

**GUWAHATI (IM)**- Puluhan warga Myanmar berkumpul di wilayah perbatasan India. Mereka menunggu untuk bisa bergabung dengan sekitar 50 orang yang telah melintasi perbatasan setelah Myanmar semakin mencekam.

Dilansir dari AFP, Minggu (7/3), otoritas Myanmar telah meminta India untuk mengirim kembali delapan polisi yang melarikan diri dari negaranya pada minggu ini. "Empat puluh delapan warga Myanmar, termasuk delapan polisi, telah memasuki negara bagian Mizoram di timur laut India," kata seorang perwira senior di pasukan paramiliter Assam Rifles kepada AFP.

"Sedikitnya 85 warga sipil dari Myanmar telah menunggu di perbatasan internasional untuk memasuki India," pejabat itu menambahkan tanpa menyebut nama. Demonstrasi antikeduta telah menyebar di seluruh Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Pasukan keamanan telah meningkatkan tindakan keras brutal terhadap pengunjuk rasa dan menyebabkan lebih dari 50 orang tewas.

Laporan media India mengatakan mereka yang telah melintasi perbatasan termasuk polisi dan pejabat lokal yang menolak untuk mengikuti perintah junta militer. Otoritas Myanmar telah mengirim surat kepada India, meminta delapan polisi itu segera dikirim kembali.

Surat itu dikirim ke pejabat di distrik Champhai Mizoram

di mana beberapa pengungsi berada. "Untuk menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara tetangga, Anda dengan hormat diminta untuk menahan delapan personel polisi Myanmar yang telah tiba di wilayah India dan diserahkan ke Myanmar," demikian isi surat tersebut.

Pejabat pemerintah India mengatakan surat itu sedang dipelajari bersama dengan kasus mereka yang telah melintasi perbatasan. India, yang berusaha membangun hubungan lebih dekat dengan Myanmar untuk melawan pengaruh China, tidak turut mengutuk kudeta tersebut.

Namun, Duta Besar India untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), TS Tirumurti, mengatakan pencapaian demokrasi Myanmar dalam beberapa tahun terakhir "tidak boleh dirusak". India diketahui berbagi perbatasan darat sepanjang 1.643 Km dengan wilayah Myanmar.

Saat ini, India telah menjadi rumah bagi ribuan pengungsi dari Myanmar, termasuk etnis Chin dan etnis minoritas Rohingya yang melarikan diri dari operasi militer Myanmar yang sarat kekerasan. Secara terpisah, pemimpin komunitas etnis Chin di New Delhi menyebut polisi Myanmar sangat jarang kabur ke India.

"Ini sesuatu yang tidak biasa. Karena di masa lalu, polisi dan militer hanya mematuhi perintah," ucap Presiden Komisi Pengungsi China di India, James Fandi.

Sementara itu, jumlah polisi Myanmar yang membelot kian

bertambah setelah tindakan keras berdarah aparat terhadap pengunjuk rasa antikudeta. Lebih dari 100 polisi menolak untuk mematuhi perintah junta hingga Sabtu (6/3).

Tanggal 28 Februari dan 3 Maret adalah hari paling berdarah sejak kudeta. Menurut laporan media lokal, setelah penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa, lebih banyak polisi melanggar ketentuan militer dan bergabung dengan gerakan antijunta. Media lokal, The Irrawaddy melaporkan, jumlah polisi yang beralih pihak telah meningkat menjadi lebih dari 100. Kelompok pertama desersi petugas polisi terjadi di Loikaw, ibu kota negara bagian kaya terkecil di negara itu. Itu terjadi selama pekan pertama protes anti-kudeta.

Rekaman gerakan dramatis ketika 49 petugas polisi memprotes dilindungi oleh para pengunjuk rasa diunggah di media sosial oleh kantor berita Kantarawaddy Times yang berbasis di Loikaw pada 10 Februari. Penjabat Kolonel Polisi Tin Min Tun dari Departemen Kepolisian Yangon adalah perwira tertinggi yang membelot, bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil pekan ini.

Dalam pesan video yang dikirim ke media lokal lainnya, Mizzima News, Tin Min Tun mengatakan polisi dan tentara telah melewati garis merah. Dia mengutip pembunuhan pengunjuk rasa anti-kudeta di kota Okalapa Utara Yangon pada Rabu (3/3).

"Orang-orang di Okalapa Utara adalah warga sipil bersenjata yang secara damai menuntut pemulihan demokrasi. Mereka kebanyakan adalah pemuda yang membela hak mereka," katanya dalam video itu seperti dikutip laman Anadolu Agency, Minggu (7/3).

"Apakah kalian tidak merasa

malu karena membunuh orang-orang ini? Kalian bertingkah lebih buruk daripada yang kalian lakukan di medan perang," ujarnya menambahkan.

Setelah hari paling berdarah dari penumpasan pada Rabu yang menewaskan sedikitnya 37 orang, puluhan petugas polisi menolak untuk menerima perintah dari junta militer. BBC Burmese Service melaporkan pekan ini bahwa lebih dari 70 petugas polisi telah melanggar barisan dan bergabung dengan gerakan antijunta. Pembelotan polisi juga dilaporkan terjadi di negara bagian Kachin Utara yang berbatasan dengan Tiongkok, negara bagian Chin yang berbatasan dengan India, dan wilayah pesisir selatan Tanintharyi pekan ini. Ngun Hnin Thang termasuk di antara petugas polisi yang menentang perintah militer untuk menembak pengunjuk rasa di kotapraja Falam, negara bagian Chin.

"Bagaimana kami bisa membombardir pengunjuk rasa damai? Ini seperti membunuh anggota keluarga kami sendiri. Itu sebabnya kami menolak menerima perintah," katanya kepada Anadolu Agency.

Dia mengatakan dia bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh polisi tetapi berjanji untuk mendukung gerakan anti-kudeta. Myanmar NOW, media berita terkemuka di negara itu, juga melaporkan pada Selasa lalu bahwa dalam unjuk rasa solidaritas dengan pengunjuk rasa anti-kudeta, 12 tentara militer Myanmar membelot ke Karen National Union (KNU), sebuah organisasi politik dengan sayap bersenjata yang mengklaim untuk mewakili orang Karen.

Lebih dari 60 orang telah tewas dan lebih dari seribu orang telah ditangkap selama serangkaian demonstrasi anti-kudeta

di kota-kota besar dan kecil di Myanmar. Rakyat mengancam pemerintahan militer setelah kudeta 1 Februari.

Sementara itu, Dewan Keamanan (DK) PBB menemui kebuntuan saat membahas mengenai situasi Myanmar. DK gagal membuat pernyataan bersama tentang tindakan keras militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi.

Sebuah pertemuan tertutup dari badan itu berakhir tanpa pernyataan, meskipun ada seruan dari Amerika Serikat (AS) dan anggota lainnya untuk front persatuan guna mengatasi krisis tersebut.

Rusia dan Tiongkok sebelumnya telah menyuarakan pendapat untuk mendukung non intervensi, menggambarkan situasi yang semakin mengkeren sebagai urusan internal. Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, dalam pertemuan itu meminta negara-negara anggota DK PBB untuk bertindak, mengingatkan bahwa harapan rakyat negara itu "memudar".

"Saya telah mendengar langsung permohonan putus asa, dari para ibu, pelajar dan orang tua, saya menerima setiap hari sekitar 2.000 pesan, untuk tindakan internasional untuk membalikkan serangan yang jelas terhadap keinginan rakyat Myanmar dan prinsip-prinsip demokrasi," ucapnya.

"Persatuan Anda dibutuhkan lebih dari sebelumnya," sambung Burgener dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/3).

Ingggris, yang memprakarsai pertemuan itu mengatakan bahwa penting bagi DK PBB untuk berbicara dalam satu suara dan mengatakan akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut melalui DK dalam beberapa hari mendatang. ● tom

## Biden Putuskan Perpanjang Sanksi Terhadap Iran

WASHINGTON (IM)- Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden telah memutuskan untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran, yang berlaku sejak 1995, untuk satu tahun lagi. Hal itu disampaikan Gedung Putih.

Gedung Putih menuturkan, tindakan dan kebijakan Iran, termasuk proliferasi dan pengembangan misil serta kemampuan senjata asimetris dan konvensional lainnya, jaringan dan kampanye agresi regionalnya, dukungannya untuk kelompok teroris, dan aktivitas jahat Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Sebagai penggantinya terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa bagi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS," kata Gedung Putih. Baca juga: Angkatan Luar Angkasa AS Luncurkan Roket Pertama untuk Pelajari Ionosfer Bumi

"Karena alasan ini, keadaan darurat nasional yang diumumkan pada 15 Maret 1995, harus terus berlaku setelah 15 Maret 2021," sambungnya, seperti dilansir Tass pada Minggu (7/3).

Keadaan darurat nasional AS Schubungan dengan Iran dideklarasikan pada Maret 1995 oleh mantan Presiden AS, Bill Clinton. Baca juga: F-35 AS Mahal tapi Bermasalah: 'Berhenti Buang Uang ke Lubang Tikus Itu' Iran sendiri belum memberikan respon atas keputusan pemerintahan Biden untuk memperpanjang sanksi tersebut.

Teheran sendiri sebelumnya telah mendesak Washington untuk mencabut semua sanksi, yang berada di bawah perjanjian nuklir.

Sementara itu, Iran bersedia melanjutkan negosiasi tentang kesepakatan nuklir 2015 jika Amerika Serikat (AS) dan kekuatan barat memberikan "sinyal yang jelas" bahwa sanksi akan dicabut dalam waktu setahun. Pernyataan itu diungkapkan pejabat senior Iran pada Financial Times. "Mereka dapat mengumumkannya dan meyakinkan kami bahwa semua sanksi yang dijatuhkan setelah JCPOA (kesepakatan nuklir Iran) akan dicabut dalam waktu kurang dari

satu tahun dan memberitahu kami untuk pergi dan merundingkan proses ini," ungkap Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Kemanfaatan yang menasihati pemimpin tertinggi dan mantan komandan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Kita harus melihat setiap bulan selama perundingan bahwa beberapa sanksi yang sangat penting bagi kita akan dicabut," papar dia.

"Misalnya, sanksi atas transaksi keuangan dan pembatasan yang diberlakukan bank-bank Eropa harus dicabut pada bulan pertama. Ekspor minyak juga menjadi prioritas utama kami," ujar dia.

Presiden AS Joe Biden telah berulang kali menyatakan niatnya kembali ke kesepakatan multilateral, yang membuat Iran mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi terhadap ekonominya.

Mantan Presiden AS Donald Trump membatalkan kesepakatan itu pada 2018 dan kemudian melanjutkan memberikan sanksi terhadap industri, perusahaan, dan individu Iran sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".

Pada gilirannya, Iran telah menurunkan komitmennya terhadap pakta tersebut dengan memperkaya uranium di luar batas yang ditetapkan perjanjian itu dan membatasi akses pengawas PBB ke fasilitas nuklirnya.

Upaya menghidupkan kembali kesepakatan telah menemui jalan buntu dalam beberapa pekan terakhir, dengan Washington bersikeras Iran harus kembali ke kepatuhan penuh dengan perjanjian nuklir dan Teheran berpendapat pencabutan sanksi harus menjadi langkah awal.

Rezaei, yang merupakan pemimpin senior IRGC selama 16 tahun, mengatakan kepada FT bahwa, "Republik Islam akan menggunakan banyak pengaruh dalam hak-hak kami dan norma-norma internasional untuk membuat AS mundur dan mencabut sanksi, sementara Teheran tidak akan melangkah maju selama tidak ada pembangunan kepercayaan." ● gul

## Pengunjuk Rasa Thailand Tuntut Pemimpin Demo Dibebaskan

BANGKOK(IM) - Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di Bangkok, Thailand, menuntut pihak berwenang membebaskan sejumlah tokoh unjuk rasa. Para demonstran mengabaikan larangan berkumpul yang diterapkan pemerintah.

Pihak berwenang Thailand menangkap tokoh-tokoh unjuk rasa yang menuntut reformasi kerajaan dan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur. Pengadilan menolak permintaan penangkuhan penahanan dengan jaminan sejumlah pemimpin unjuk rasa.

"Bebaskan teman-teman kami," teriak para pengunjuk rasa, Minggu (7/3).

Para demonstran berkumpul di depan gedung pengadilan yang dipagari dengan

kawat besi. Terlihat truk water canon di dekat gerbang gedung pengadilan.

Pengunjuk rasa juga menuntut agar undang-undang lese majeste yang melindungi kerajaan dari kritikan dihapuskan. Dalam undang-undang pidana Thailand undang-undang itu masuk ke pasal 112.

Sejumlah pengunjuk rasa juga membakar foto raja. Kelompok yang berbeda juga menggelar unjuk rasa di lokasi lain di Bangkok. Sabtu (6/3) kemarin polisi sudah memperingatkan petugas mungkin akan menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan bila pengunjuk rasa tidak mengabaikan larangan berkumpul.

"Unjuk rasa ilegal, siapa pun yang bergabung atau me-

ngundang orang lain untuk bergabung maka melanggar hukum," kata deputi komisioner Biro Kepolisian Metropolitan Bangkok Piya Tavichai dalam konferensi pers.

Pekan lalu untuk pertama kalinya polisi Thailand menggunakan peluru karet, gas air mata dan water canon untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sepuluh pengunjuk rasa dan 25 polisi terluka dalam bentrokan pekan lalu. Dalam sebuah podcast Prayuth meminta warga Thailand mematuhi hukum dan menghindari konflik.

"Kami harus menyayangi satu sama lain dan bersatu, tidak pecah-belah dan menghormati hukum," kata Prayuth yang mulai berkuasa melalui kudeta militer 2014 lalu. ● ans



PENYELUNDUPAN MIGRAN KE AS

Penyelundup kembali ke arah Meksiko setelah mengantarkan keluarga migran dan anak-anak menyebrangi Sungai Rio Grande masuk ke Amerika Serikat di Penitas, Amerika Serikat, Sabtu (6/3). Foto diambil dengan drone.

## Trump Tuntut Partai Republik Setop Pakai Namanya untuk Galang Dana

WASHINGTON (IM)- Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali bersitegang dengan partai Republik. Trump menuntut tiga komite partai Republik berhenti menggunakan nama dan gambarnya untuk melakukan penggalangan dana.

Seperti dilansir Reuters, Minggu (7/3) seorang penasihat Trump, yang mengonfirmasi laporan dari Politico, mengatakan pengacara Trump pada hari Jumat lalu (5/3) telah mengirim surat ke Komite Nasional Republikan (RNC), Kampanye Kongres Nasional Republikan (RCC) dan Kampanye Senat Republik Nasional (NRSC), meminta mereka untuk berhenti menggunakan nama dan apa pun terkait dirinya dalam penggalangan dana melalui e-Mail ataupun dengan barang dagangan.

Penasihat itu mengatakan Trump sensitif terhadap penggunaan nama dan apa pun terkait dirinya untuk tujuan pencitraan merk. Ia kesal karena ketiga kelompok tersebut telah mendukung anggota parlemen dari Partai Republik yang bergabung dengan Demokrat dalam memakzulkannya atas serangan 6 Januari di Capitol AS.

Trump menggunakan Save America SuperPAC-nya untuk mengumpulkan dana membantu kandidat Republik yang dipilih sendiri dalam pemilihan kongres 2022. Beberapa dari mereka diharapkan untuk menantang petahana Republik.

Perang saudara telah meletus di dalam kubu Partai Republik, di mana tokoh-tokoh seperti pemimpin minoritas Senat Mitch McConnell ingin sekali menempatkan Trump di posisi terdepak. Sedangkan tokoh lainnya seperti sekutu Trump, Senator Lindsey Graham, percaya bahwa masa depan partai bergantung pada energi kaum pro-Trump.

Trump telah mengobarkan perang kata-kata dengan para pendukung Partai Republik, beberapa di antaranya karena dia merasa dikhianati dengan bergabung dengan Demokrat dalam memakzulkannya.

Trump, yang sekarang tinggal di klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, mengisyaratkan kemungkinan pencalonan dirinya sebagai presiden pada 2024 saat berpidato dalam acara konferensi konservatif Minggu lalu.

Namun, Trump telah berkomitmen untuk membantu Partai Republik untuk memenangkan kendali Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat dalam pemilihan kongres 2022, yang akan menjadi referendum pertama terhadap kepemimpinan Presiden dari partai Demokrat, Joe Biden. ● ans



UNJUK RASA ANTI PEMERINTAH

Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah yang mengenakan topeng berjalan dalam protes menuntut pembebasan para pemimpin yang ditangkap dengan tuduhan hukum lese majeste di Bangkok, Thailand, Sabtu (6/3).

## Penanganan Pandemi Diprotes, Presiden Paraguay Reshuffle Kabinet

PARAGUAY (IM)- Presiden Paraguay Mario Abdo Benitez mengumumkan reshuffle kabinet pada Sabtu (6/3) setelah aksi protes digalangan atas penanganan pemerintah terhadap krisis akibat pandemi corona (COVID-19).

Seperti dilansir AFP, Minggu (7/3) Benitez mengumumkan sejumlah orang-orang baru akan ditempatkan di beberapa posisi, seperti di Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Masalah Perempuan, dan Urusan Sipil.

"Saya yakin bahwa para pria dan wanita yang disebutkan akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi krisis yang sedang dialami negara ini," kata presiden.

Pada Jumat (5/3) malam waktu setempat, ribuan pengunjuk rasa bertrok dengan petugas polisi, menyerang toko-toko dan membakar mobil-mobil. Menurut pejabat rumah sakit setempat, sebanyak 21 orang terluka akibat kerusuhan tersebut.

Menteri Kesehatan Julio Mazzoleni mengajukan pengunduran dirinya usai mendapat serangan dari anggota parlemen, termasuk beberapa dari partai yang berkuasa, dan dari serikat pekerja kesehatan terkait penanganan pandemi. Pengunduran diri itu diumumkan pada hari Jumat (5/3) setelah pertemuan dengan presiden.

Pada hari Sabtu (6/3), 5.000 orang lainnya keluar untuk melanjutkan protes terkait penanganan pandemi di negara itu. Namun demonstrasi berlangsung damai, dimana menyerukan pengunduran diri presiden.

Hingga Jumat (5/3), Paraguay telah melaporkan 165.811 kasus virus corona dan 3.278 kematian. Paraguay masih menunggu kedatangan empat juta dosis vaksin dari Covax, dan satu juta dosis Sputnik 5 Rusia, untuk memvaksinasi lebih dari tujuh juta populasi di negara itu. Sejauh ini, Paraguay baru menerima 4.000 dosis vaksin dari Rusia, yang ditujukan untuk para petugas tenaga medis. ● gul